

Penerapan Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sinjai

Salman

Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

Received: 06/04/2026

Revised: 21/05/2026

Accepted: 02/06/2026

Abstract

This study aims to analyze the application of dynamic governance in the implementation of Child-Friendly Regencies/Cities (KLA) in Sinjai Regency. The focus of the study is directed at three main capabilities, namely thinking ahead, thinking again, and thinking across. The research uses a descriptive qualitative approach. The research data sources include primary data from in-depth interviews and observations on the UPTD PPA, the field of child and women's protection, the Children's Forum, and elements of society, and secondary data in the form of institutional documentation, case data of the UPTD PPA Sinjai Regency in 2017-2024, KLA regulations, and supporting documents for the implementation of KLA. The results show that thinking ahead has been seen through openness to regulatory changes and long-term decision-making, but it is still hampered by delays in the flow of information and uneven distribution of programs. Thinking again is carried out through routine evaluations and preventive action plans, but its effectiveness is still influenced by low community participation and increasing cases of violence against children. Thinking across can be seen through the use of SIMFONI PPA, the integration of five KLA clusters, hybrid field verification, and cross-sector collaboration, but access to innovation is not even in remote villages. This study concludes that the implementation of dynamic governance in Sinjai has grown, but it still requires strengthening policy communication, participatory evaluation, village-based risk maps, and equitable distribution of child protection innovations.

Keywords

Dynamic Governance; Child-Friendly Regencies/Cities; Child Protection; Thinking Ahead; Think Again; Thinking Across

Corresponding Author

Salman

Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia; Salmanimm45@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat. Perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, tuntutan pelayanan publik, dan meningkatnya perhatian terhadap kelompok rentan menuntut pemerintah untuk tidak hanya bekerja berdasarkan prosedur administratif, tetapi juga mampu membaca perubahan, mengevaluasi praktik yang sedang berjalan, dan membangun kolaborasi lintas sektor. Dalam konteks tersebut, konsep dynamic governance menjadi relevan karena menekankan kemampuan pemerintah untuk berpikir ke depan, berpikir kembali, dan berpikir lintas batas dalam merespons persoalan



publik yang kompleks (Linda Widowati, Kristina Setyowati, 2023; Rizki et al., 2023).

Dynamic governance tidak memandang kebijakan sebagai produk statis. Kebijakan dipahami sebagai proses yang terus disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis. Pemerintah yang dinamis tidak cukup hanya memiliki regulasi dan struktur organisasi, tetapi juga membutuhkan budaya kerja adaptif, sumber daya manusia yang mampu belajar, dan proses kelembagaan yang lincah (Sari et al., 2023; Linda Widowati et al., 2023). Kemampuan inilah yang penting dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), karena isu anak tidak berdiri sendiri. Pemenuhan hak anak berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, administrasi kependudukan, pengasuhan keluarga, ruang publik, lingkungan digital, dan partisipasi anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, serta anak dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menempatkan anak bukan hanya sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk dilindungi, didengar, dan dilibatkan sesuai tingkat perkembangannya. Karena itu, keberhasilan KLA tidak cukup diukur dari predikat penghargaan, tetapi juga dari sejauh mana tata kelola daerah mampu menciptakan lingkungan yang aman, responsif, kolaboratif, dan berkelanjutan bagi anak (Duadji, 2018; Roza, 2018).

Kabupaten Sinjai telah menunjukkan komitmen dalam penyelenggaraan KLA melalui pembentukan kelembagaan, pelaksanaan program ramah anak, penguatan Forum Anak, dan koordinasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah. Dokumen data penelitian menunjukkan bahwa Sinjai memperoleh predikat Madya sebagai Kabupaten Layak Anak dan sebelumnya mempertahankan kategori Pratama selama beberapa tahun. Capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan formal dalam penguatan KLA. Namun, data kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan anak masih membutuhkan perhatian serius. Data UPTD PPA Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak naik dari 46 kasus pada 2023 menjadi 54 kasus pada 2024, sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan naik dari 21 kasus menjadi 36 kasus pada periode yang sama.

Dinamika angka kasus tersebut penting dibaca secara hati-hati. Peningkatan kasus dapat menunjukkan meningkatnya kejadian kekerasan, tetapi juga dapat menandakan bertambahnya keberanian korban dan masyarakat untuk melapor. Kedua kemungkinan tersebut sama-sama menuntut kapasitas tata kelola yang adaptif. Apabila peningkatan menunjukkan eskalasi kekerasan, maka pemerintah perlu memperkuat pencegahan dan perlindungan khusus. Apabila peningkatan menunjukkan membaiknya pelaporan, maka pemerintah perlu memastikan bahwa kapasitas pendampingan, pencatatan, rujukan layanan, dan pemulihan korban juga ikut diperkuat. Dengan

demikian, data kasus bukan sekadar angka administratif, melainkan sinyal kebijakan yang harus diolah melalui mekanisme *thinking ahead* dan *thinking again*.

Masalah lain yang muncul dalam penelitian adalah belum meratanya akses inovasi dan program KLA di desa-desa, terutama wilayah yang terkendala jaringan internet dan jarak layanan. Pemanfaatan aplikasi SIMFONI PPA, verifikasi lapangan hybrid, dan integrasi lima klaster KLA merupakan kemajuan yang menunjukkan adanya *thinking across*. Akan tetapi, inovasi digital dan koordinasi lintas sektor tidak akan efektif apabila sebagian masyarakat belum memiliki akses yang memadai atau belum mengetahui saluran pengaduan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan utama bukan hanya menciptakan inovasi, tetapi juga memastikan inovasi dapat diakses secara adil oleh semua wilayah (Sari et al., 2023; Rannita et al., 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyelenggaraan KLA membutuhkan peran pemerintah daerah, penguatan kelembagaan, serta integrasi kebijakan perlindungan anak (Hamudy, 2015; Roza, 2018). Kajian lain menekankan pentingnya *collaborative governance*, jejaring kebijakan, dan partisipasi anak dalam penyelenggaraan KLA (Duadji & Tresiana, 2018; (Firda Pujianti et al, 2023 (Alviana et al 2021); Rannita & Al Hafis, 2024; Tandhim, 2025; Deddy et al., 2023). Sementara itu, penelitian (Sari et al., 2023), secara khusus menunjukkan bahwa *dynamic governance* dalam KLA dapat dibaca melalui *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*. Namun, kajian pada konteks kabupaten yang memiliki keterbatasan sumber daya dan karakteristik wilayah beragam masih perlu diperkuat. Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menelaah bagaimana prinsip *dynamic governance* diterapkan dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten Sinjai, serta hambatan apa yang muncul dalam pelaksanaannya.

Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan *dynamic governance*, khususnya kapabilitas *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*, dalam tata kelola KLA di Kabupaten Sinjai. Analisis diarahkan pada data primer dan sekunder penelitian, terutama data wawancara, observasi, dokumentasi kelembagaan, dan data kasus UPTD PPA Kabupaten Sinjai. Secara teoritis, artikel ini memperkaya kajian administrasi publik mengenai tata kelola adaptif pada isu perlindungan anak. Secara praktis, artikel ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan, evaluasi, dan inovasi lintas sektor dalam penyelenggaraan KLA.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami proses, makna, dan dinamika kelembagaan dalam penyelenggaraan KLA. Fokus penelitian tidak diarahkan pada pengujian hipotesis statistik, melainkan pada penjelasan mendalam mengenai bagaimana pemerintah daerah, Forum Anak, dan

masyarakat memaknai serta menjalankan prinsip *dynamic governance* dalam konteks perlindungan anak di Kabupaten Sinjai.

Lokasi penelitian berada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Pemilihan lokasi didasarkan pada peran kelembagaan tersebut sebagai pelaksana utama program perlindungan perempuan dan anak sekaligus simpul koordinasi penyelenggaraan KLA. Informan penelitian terdiri atas Kepala UPTD PPA, pejabat bidang perlindungan anak dan perempuan, Ketua Forum Anak Sinjai, serta perwakilan masyarakat. Komposisi informan ini dipilih untuk menggambarkan perspektif penyelenggara, mitra partisipatif anak, dan penerima layanan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap Kepala UPTD PPA, pejabat bidang perlindungan anak dan perempuan, Ketua Forum Anak Sinjai, serta perwakilan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi kelembagaan, struktur organisasi, program penguatan KLA, penggunaan SIMFONI PPA, dokumen verifikasi lapangan, data kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dari UPTD PPA Kabupaten Sinjai tahun 2017-2024, regulasi KLA, dan dokumen pendukung pelaksanaan KLA. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai strategi antisipasi perubahan kebijakan, mekanisme evaluasi program, bentuk inovasi layanan, serta hambatan pelaksanaan KLA. Observasi digunakan untuk memahami konteks layanan dan dinamika kelembagaan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat triangulasi data.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data wawancara dikelompokkan ke dalam tiga tema utama sesuai konsep *dynamic governance*, yaitu *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*. Data dokumentasi dan angka kasus digunakan sebagai bahan triangulasi untuk memperkuat interpretasi temuan. Validitas data dijaga melalui perbandingan antar sumber informasi, penelusuran konsistensi antara wawancara dan dokumen, serta penafsiran temuan secara kontekstual sesuai fokus penelitian.

Batasan penelitian ini adalah penggunaan data kualitatif yang berasal dari informan utama dan dokumen pendukung yang tersedia selama proses penelitian. Oleh karena itu, artikel ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi statistik untuk seluruh daerah, melainkan memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan *dynamic governance* pada konteks Kabupaten Sinjai. Meskipun demikian, temuan penelitian dapat menjadi bahan refleksi bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam penyelenggaraan KLA.

Table 1. Fokus Analisis *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan KLA

Kapabilitas	Makna operasional	Data yang dianalisis
Thinking ahead	Kemampuan membaca perubahan, mengantisipasi risiko, dan menyusun orientasi jangka panjang.	Respons terhadap perubahan regulasi, perencanaan tahunan, visi anak menuju Indonesia Emas 2045, distribusi program.
Thinking again	Kemampuan mengevaluasi kebijakan dan belajar dari pelaksanaan program.	Rapat evaluasi, tindak lanjut peningkatan kasus, pelibatan masyarakat, perbaikan program.
Thinking across	Kemampuan belajar lintas sektor dan mengadopsi inovasi dari luar batas organisasi.	SIMFONI PPA, integrasi lima klaster KLA, verifikasi hybrid, kolaborasi OPD, forum anak, komunitas.

Table 1 menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan tiga kapabilitas *dynamic governance* sebagai fokus analisis. *Thinking ahead* digunakan untuk membaca kemampuan antisipasi dan orientasi jangka panjang, *thinking again* digunakan untuk menilai evaluasi dan pembelajaran kebijakan, sedangkan *thinking across* digunakan untuk melihat inovasi dan kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan KLA.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

1. Konteks Kelembagaan Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Sinjai

Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Sinjai berada dalam kerangka kelembagaan yang melibatkan DP3AP2KB, UPTD PPA, organisasi perangkat daerah terkait, Forum Anak, sekolah, puskesmas, pemerintah desa/kelurahan, organisasi masyarakat, dan unsur masyarakat. DP3AP2KB berperan sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sedangkan UPTD PPA berperan penting dalam penerimaan laporan, pendampingan, pencatatan kasus, dan koordinasi layanan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.

Dalam perspektif *dynamic governance*, keberadaan struktur kelembagaan tidak otomatis menjamin tata kelola yang dinamis. Struktur perlu didukung oleh pola kerja yang responsif, mekanisme koordinasi yang jelas, penggunaan data, serta kemampuan melakukan pembelajaran kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut telah mulai dibangun melalui rapat koordinasi, kegiatan penguatan KLA, pemanfaatan aplikasi, dan keterlibatan Forum Anak. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kecepatan arus informasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan akses layanan di wilayah yang jauh dari pusat kabupaten.

Lima klaster KLA yang menjadi dasar pemenuhan hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Dalam praktiknya, kelima klaster tersebut tidak dapat

dijalankan oleh satu dinas saja. Misalnya, klaster kesehatan membutuhkan dukungan puskesmas dan dinas kesehatan, klaster pendidikan membutuhkan sekolah dan dinas pendidikan, sementara klaster perlindungan khusus memerlukan kerja sama dengan UPTD PPA, aparat penegak hukum, pemerintah desa, psikolog, pendamping sosial, dan keluarga. Oleh karena itu, KLA menjadi arena yang tepat untuk menilai kapasitas thinking across pemerintah daerah.

Konteks kelembagaan Kabupaten Sinjai juga memperlihatkan pentingnya penguatan pemerintah desa. Banyak persoalan anak terjadi pada ruang terdekat, yaitu keluarga, sekolah, lingkungan bermain, dan komunitas. Apabila sistem perlindungan anak hanya kuat pada tingkat kabupaten, maka respons terhadap kasus di desa dapat terlambat. Sebaliknya, apabila pemerintah desa memiliki pemahaman, saluran pengaduan, dan jejaring rujukan yang jelas, maka pencegahan dan penanganan kasus akan lebih cepat. Inilah alasan mengapa pemerataan informasi dan inovasi hingga tingkat desa menjadi isu penting dalam dynamic governance KLA.

2. Analisis Data Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan

Table 2. Data Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Kabupaten Sinjai

Tahun	Kasus anak	Kasus perempuan	Total
2017	16	10	26
2018	18	20	38
2019	42	18	60
2020	19	18	37
2021	20	16	36
2023	46	21	67
2024	54	36	90

Table 2 menunjukkan bahwa kasus kekerasan anak dan perempuan di Kabupaten Sinjai mengalami dinamika yang cukup tajam. Data ini menjadi dasar penting untuk menilai kebutuhan thinking ahead dan thinking again, karena peningkatan kasus harus diterjemahkan menjadi pencegahan, pendampingan, rujukan layanan, dan perbaikan program berbasis data.

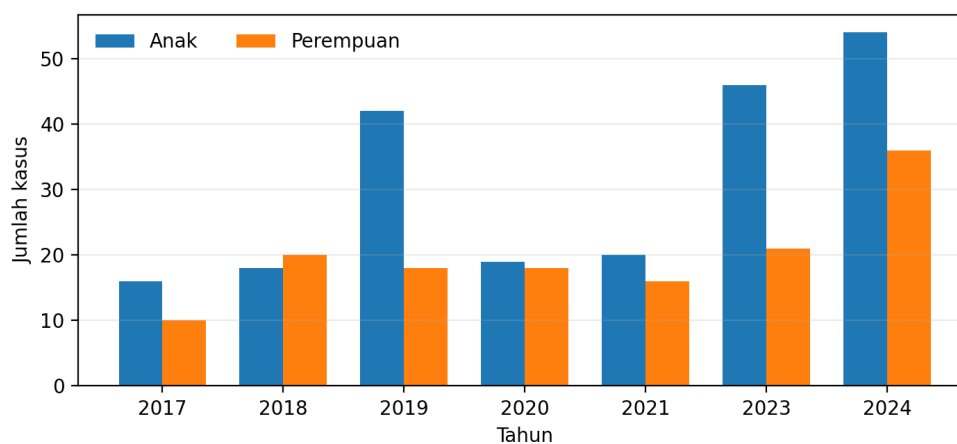


Figure 1. Jumlah kasus kekerasan anak dan perempuan di Kabupaten Sinjai

Sumber: diolah dari data UPTD PPA Kabupaten Sinjai (dokumen penelitian, 2024).

Data kasus memperlihatkan dinamika yang tidak linier. Pada periode 2017-2021, kasus kekerasan terhadap anak bergerak dari 16 kasus pada 2017, naik menjadi 18 kasus pada 2018, melonjak menjadi 42 kasus pada 2019, kemudian turun menjadi 19 kasus pada 2020 dan 20 kasus pada 2021. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan bergerak dari 10 kasus pada 2017, naik menjadi 20 kasus pada 2018, kemudian relatif stabil pada angka 18 kasus pada 2019-2020, dan turun menjadi 16 kasus pada 2021. Perubahan yang cukup tajam pada 2019 memperlihatkan perlunya sistem kewaspadaan dini dan mekanisme analisis penyebab kasus.

Pada periode 2023-2024, data menunjukkan peningkatan yang lebih jelas. Kasus anak meningkat dari 46 menjadi 54 kasus, sedangkan kasus perempuan meningkat dari 21 menjadi 36 kasus. Secara persentase, kasus anak naik sekitar 17,4 persen, sedangkan kasus perempuan naik sekitar 71,4 persen. Peningkatan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah. Dalam perspektif *dynamic governance*, angka tersebut tidak cukup dibaca sebagai laporan akhir, tetapi harus menjadi dasar untuk memperkuat pencegahan, memperluas sosialisasi, meningkatkan kualitas pendampingan, dan mengevaluasi efektivitas program yang telah dilaksanakan.

Kenaikan angka juga harus dipahami dalam dua sisi. Pertama, kenaikan dapat menunjukkan meningkatnya risiko kekerasan di lingkungan anak dan perempuan. Kedua, kenaikan dapat menunjukkan membaiknya kesadaran melapor atau membaiknya pencatatan kasus. Apabila kedua kemungkinan ini tidak dibedakan, pemerintah dapat salah menentukan respons. Karena itu, dibutuhkan analisis data yang lebih rinci, misalnya berdasarkan jenis kekerasan, lokasi kejadian, usia korban, relasi pelaku dengan korban, saluran pelaporan, waktu penanganan, dan status tindak lanjut. Data seperti ini dapat membantu pemerintah bergerak dari pendekatan reaktif menuju pendekatan prediktif dan preventif.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa jenis kekerasan terhadap anak yang menonjol antara lain kekerasan seksual, kekerasan fisik, perundungan, dan kekerasan psikis. Variasi bentuk kekerasan ini memperlihatkan bahwa upaya pencegahan harus melibatkan banyak sektor. Kekerasan seksual membutuhkan edukasi perlindungan diri, pendampingan psikologis, penegakan hukum, dan penguatan keluarga. Perundungan membutuhkan peran sekolah ramah anak, guru, komite sekolah, dan teman sebaya. Kekerasan fisik dan psikis membutuhkan penguatan pengasuhan positif dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Dengan demikian, data kasus harus diterjemahkan menjadi intervensi lintas klaster.

Dari sisi tata kelola, data tersebut menuntut integrasi antara sistem pelaporan dan sistem perencanaan. Setiap peningkatan kasus seharusnya memunculkan pertanyaan evaluatif: wilayah mana yang paling berisiko, kelompok usia mana yang paling rentan, program apa yang sudah dilakukan, program mana yang belum menjangkau masyarakat, dan sumber daya apa yang perlu ditambah. Tanpa mekanisme semacam itu, laporan kasus berpotensi berhenti sebagai arsip administratif. Oleh karena itu, *thinking again* perlu diperkuat agar data kasus menjadi bahan pembelajaran kebijakan yang nyata.

3. Thinking Ahead: Antisipasi Perubahan dan Orientasi Jangka Panjang

Thinking ahead dalam penelitian ini dimaknai sebagai kemampuan pemerintah daerah membaca sinyal perubahan, mengantisipasi risiko, dan menyusun keputusan jangka panjang. Dalam penyelenggaraan KLA, kemampuan ini penting karena isu anak selalu berubah mengikuti perkembangan sosial. Perubahan pola kekerasan, penggunaan teknologi digital oleh anak, mobilitas keluarga, kemiskinan, stunting, dan perubahan regulasi pusat dapat memengaruhi arah program daerah. Pemerintah yang memiliki *thinking ahead* tidak menunggu masalah membesar, tetapi berusaha mendeteksi gejala awal dan menyiapkan respons.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa UPTD PPA dan bidang perlindungan anak menyadari bahwa perubahan kebijakan adalah sesuatu yang wajar dan harus direspons secara terbuka. Informan menjelaskan bahwa apabila terdapat perubahan regulasi atau arahan program dari pusat dan provinsi, daerah perlu melakukan penyesuaian secara berjenjang. Sikap terbuka dan adaptif ini merupakan modal awal *thinking ahead*. Pemerintah daerah tidak menolak perubahan, tetapi berusaha menyelaraskan program lokal dengan agenda nasional.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa arus informasi dari pusat atau provinsi tidak selalu cepat sampai ke pelaksana di daerah. Kondisi ini dapat menyebabkan penyesuaian program tidak berjalan serentak atau tidak langsung dipahami oleh semua pihak. Dalam konteks *dynamic governance*, keterlambatan informasi merupakan hambatan penting karena dapat mengurangi

kelincahan organisasi. Program perlindungan anak sering membutuhkan respons cepat, terutama apabila berkaitan dengan kasus kekerasan, perubahan mekanisme pelaporan, atau kebutuhan dokumen evaluasi KLA. Karena itu, penguatan kanal komunikasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak.

Pada aspek pengambilan keputusan jangka panjang, temuan menunjukkan bahwa DP3AP2KB dan UPTD PPA menggunakan rapat, diskusi, dan koordinasi sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Rencana kerja tahunan disusun dengan mengacu pada arah pembangunan daerah dan kebijakan nasional. Keputusan jangka panjang juga dihubungkan dengan slogan 'Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045'. Slogan tersebut memiliki makna strategis karena menempatkan program anak sebagai investasi masa depan, bukan sekadar kegiatan tahunan.

Orientasi jangka panjang terlihat dalam program peningkatan kapasitas anak, dukungan terhadap Forum Anak, dan pencegahan stunting. Program peningkatan kapasitas anak relevan karena mendorong partisipasi dan kepemimpinan anak. Pencegahan stunting relevan karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Keduanya menunjukkan bahwa KLA tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan dari kekerasan, tetapi juga sebagai pembangunan ekosistem tumbuh kembang anak. Ini merupakan bentuk *thinking ahead* yang substantif.

Meskipun demikian, masyarakat menilai bahwa program jangka panjang belum merata ke seluruh desa. Sebagian wilayah merasakan manfaat program lebih cepat, sedangkan wilayah lain masih menunggu realisasi. Ketimpangan distribusi ini menjadi catatan penting. *Thinking ahead* tidak hanya berarti memiliki visi masa depan, tetapi juga memastikan strategi implementasi dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran. Apabila perencanaan jangka panjang tidak diikuti peta kebutuhan wilayah, maka program berisiko terkonsentrasi pada wilayah yang lebih mudah dijangkau.

Agar *thinking ahead* lebih kuat, pemerintah daerah perlu mengembangkan peta risiko perlindungan anak berbasis desa. Peta risiko dapat memuat data kasus, akses layanan, ketersediaan forum anak, keberadaan sekolah ramah anak, akses internet, dan kondisi sosial ekonomi. Dengan peta tersebut, pemerintah dapat menentukan prioritas intervensi secara lebih tepat. Misalnya, desa dengan akses layanan rendah dan kasus tinggi dapat menjadi prioritas sosialisasi, pembentukan tim perlindungan anak, serta peningkatan kapasitas kader desa.

Table 3. Ringkasan Temuan Thinking Ahead

Aspek	Temuan utama	Implikasi tata kelola
Antisipasi perubahan	Pelaksana bersikap terbuka terhadap perubahan regulasi dan berupaya menyesuaikan program dengan kebijakan pusat/provinsi.	Dibutuhkan kanal komunikasi kebijakan yang cepat, terdokumentasi, dan mudah dipahami sampai tingkat desa.
Keputusan jangka panjang	Program diarahkan pada peningkatan kapasitas anak, pencegahan stunting, dan orientasi Indonesia Emas 2045.	Visi jangka panjang perlu diterjemahkan menjadi peta jalan KLA dan indikator capaian tahunan.
Pemerataan program	Manfaat program belum dirasakan secara merata oleh semua desa.	Perlu peta risiko berbasis desa dan prioritas intervensi bagi wilayah terpencil.

Table 3 memperlihatkan bahwa thinking ahead di Kabupaten Sinjai sudah tampak melalui keterbukaan terhadap perubahan regulasi dan orientasi program jangka panjang. Namun, kemampuan ini masih perlu diperkuat melalui komunikasi kebijakan yang cepat, peta jalan KLA, dan prioritas intervensi bagi desa yang belum terjangkau secara merata.

4. Thinking Again: Evaluasi, Pembelajaran, dan Koreksi Program

Thinking again merupakan kemampuan pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan, strategi, dan program yang sedang berjalan. Dalam penyelenggaraan KLA, thinking again penting karena program perlindungan anak tidak selalu menghasilkan dampak yang segera terlihat. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah sosialisasi benar-benar dipahami masyarakat, apakah mekanisme pengaduan mudah diakses, apakah korban memperoleh pendampingan yang memadai, dan apakah kolaborasi lintas sektor berjalan efektif.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan pada akhir program atau melalui rapat evaluasi bersama tim. Evaluasi digunakan untuk melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Apabila terjadi peningkatan kasus kekerasan, pelaksana melakukan identifikasi penyebab dan koordinasi dengan pihak terkait. Praktik ini menunjukkan bahwa mekanisme thinking again telah tersedia. Pemerintah daerah tidak hanya menjalankan program, tetapi juga melakukan refleksi atas hasil pelaksanaan.

Bidang perlindungan anak menyebutkan bahwa temuan evaluasi ditindaklanjuti dengan rencana aksi pencegahan, misalnya kampanye anti-kekerasan di sekolah dan desa. Forum Anak juga menyampaikan masukan melalui pertemuan resmi atau rapat evaluasi bersama DP3A. Sementara itu, masyarakat dapat terlibat melalui musyawarah, posko pengaduan, dan media sosial. Keterlibatan berbagai pihak ini menjadi indikasi bahwa evaluasi tidak sepenuhnya bersifat internal birokrasi, tetapi mulai membuka ruang partisipasi.

Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam evaluasi belum maksimal. Sebagian warga belum mengetahui cara melapor, merasa malu, atau sungkan menyampaikan kasus. Hambatan budaya dan psikologis seperti ini sangat penting dalam isu kekerasan terhadap anak. Banyak kasus kekerasan terjadi dalam relasi dekat, sehingga keluarga atau korban merasa takut membuka laporan. Apabila hambatan pelaporan tidak diatasi, data evaluasi akan selalu kurang lengkap dan kebijakan berisiko tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Thinking again juga masih terkendala oleh keterbatasan tenaga pendamping dan belum meratanya sosialisasi ke semua desa. Keterbatasan tenaga berarti bahwa tindak lanjut hasil evaluasi tidak selalu dapat dilakukan secara cepat dan intensif. Padahal, evaluasi yang baik membutuhkan kapasitas tindak lanjut. Jika hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kekerasan, maka perlu ada pendampingan, edukasi keluarga, penguatan sekolah, dan koordinasi rujukan. Semua itu memerlukan sumber daya manusia, anggaran, serta waktu.

Dalam perspektif *dynamic governance*, evaluasi sebaiknya tidak berhenti pada laporan kegiatan. Evaluasi perlu bergerak menuju pembelajaran kelembagaan. Artinya, setiap program yang dinilai kurang efektif harus menghasilkan perubahan desain program berikutnya. Misalnya, apabila sosialisasi umum tidak meningkatkan pelaporan, maka pemerintah dapat mengubah strategi menjadi edukasi berbasis kelompok kecil di desa. Apabila pengaduan melalui media sosial tidak menjangkau warga tertentu, maka perlu disediakan kanal pengaduan melalui kader desa, guru, atau tokoh masyarakat yang dipercaya.

Pemerintah juga perlu membedakan evaluasi output dan evaluasi outcome. Output dapat berupa jumlah kegiatan sosialisasi, jumlah peserta, jumlah sekolah yang dikunjungi, atau jumlah rapat koordinasi. Outcome berkaitan dengan perubahan pengetahuan, perubahan perilaku, peningkatan keberanian melapor, penurunan risiko, dan kualitas pemulihan korban. Penyelenggaraan KLA membutuhkan keduanya, tetapi evaluasi outcome sering lebih sulit dilakukan. Karena itu, pemerintah daerah dapat mulai mengembangkan instrumen sederhana untuk mengukur pemahaman anak, guru, orang tua, dan aparat desa setelah program dilaksanakan.

Keterlibatan Forum Anak menjadi komponen penting dalam *thinking again*. Anak dapat memberikan informasi mengenai lingkungan sekolah, ruang bermain, perundungan, penggunaan media sosial, dan kebutuhan partisipasi yang mungkin tidak terlihat oleh orang dewasa. Namun, partisipasi anak perlu difasilitasi secara aman dan bermakna. Forum Anak tidak boleh hanya dilibatkan sebagai simbol, melainkan perlu diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman, mengusulkan program, dan memperoleh umpan balik dari pemerintah atas usulan tersebut. Dengan cara ini, evaluasi menjadi lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip KLA.

Table 4. *Kebutuhan Penguatan Thinking Again*

Masalah evaluasi	Dampak	Penguatan yang diperlukan
Partisipasi masyarakat belum maksimal	Data kasus dan kebutuhan lapangan belum sepenuhnya tergambar.	Sosialisasi kanal pengaduan, perlindungan pelapor, dan forum evaluasi desa.
Keterbatasan tenaga pendamping	Tindak lanjut kasus dan program pencegahan berisiko lambat.	Penguatan jejaring pendamping, kader desa, dan kerja sama profesi.
Evaluasi masih dominan administratif	Perubahan desain program belum selalu berbasis outcome.	Instrumen evaluasi outcome dan umpan balik rutin dari anak, sekolah, serta keluarga.

Table 4 menjelaskan bahwa thinking again tidak hanya membutuhkan rapat evaluasi, tetapi juga tindak lanjut yang mengubah desain program. Partisipasi masyarakat, ketersediaan pendamping, dan pemanfaatan data kasus menjadi aspek penting agar evaluasi tidak berhenti sebagai laporan administratif.

5. *Thinking Across: Inovasi dan Kolaborasi Lintas Sektor*

Thinking across merupakan kemampuan pemerintah untuk belajar dari ide, pengalaman, dan praktik lintas organisasi atau lintas wilayah. Dalam penyelenggaraan KLA, thinking across menjadi krusial karena pemenuhan hak anak tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga. Pemerintah perlu menghubungkan sektor kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, keamanan, keagamaan, desa, media, keluarga, dan komunitas anak. Kolaborasi tersebut harus berjalan bukan hanya pada level rapat, tetapi juga pada pembagian peran dan tindak lanjut kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu inovasi penting adalah pemanfaatan aplikasi SIMFONI PPA. Aplikasi ini membantu pencatatan kasus secara lebih cepat dan terhubung dengan sistem pelaporan yang lebih luas. Dengan sistem digital, data kasus dapat dimasukkan, diperbarui, dan digunakan untuk koordinasi. Pemanfaatan SIMFONI PPA menunjukkan adanya kemauan pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi dalam memperbaiki tata kelola perlindungan anak.

Kendala utama pemanfaatan SIMFONI PPA adalah jaringan internet yang belum merata. Informan menyebutkan bahwa ketika jaringan di lokasi korban kurang baik, pencatatan dilakukan secara manual terlebih dahulu kemudian diinput setelah akses tersedia. Hal ini memperlihatkan bahwa inovasi digital tetap memerlukan dukungan infrastruktur dan prosedur alternatif. Pemerintah daerah tidak dapat hanya mengandalkan aplikasi, tetapi juga perlu memastikan bahwa petugas memiliki panduan pencatatan manual, mekanisme sinkronisasi, dan standar keamanan data korban.

Inovasi lain adalah integrasi lima klaster KLA ke dalam program OPD yang relevan. Contohnya adalah sekolah ramah anak, ruang bermain ramah anak, dan layanan kesehatan ramah anak di

puskesmas. Integrasi ini mencerminkan *thinking across* karena setiap OPD diposisikan sebagai bagian dari ekosistem KLA. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga ruang aman dari kekerasan dan perundungan. Puskesmas tidak hanya memberi layanan kesehatan, tetapi juga dapat menjadi titik deteksi dini masalah tumbuh kembang dan kekerasan. Ruang bermain tidak hanya menjadi fasilitas publik, tetapi juga bagian dari hak anak atas rekreasi yang aman.

Forum Anak juga berperan dalam menghasilkan ide kegiatan, seperti kampanye anti-bullying, pelatihan kepemimpinan anak, dan lomba kreativitas berbasis hak anak. Ide-ide tersebut penting karena berasal dari pengalaman anak. Kegiatan yang dirancang dengan masukan anak cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan dan bahasa anak. Dalam perspektif *dynamic governance*, partisipasi Forum Anak menjadi bentuk pembelajaran lintas generasi: pemerintah belajar dari anak, sementara anak belajar mengenai proses kebijakan publik.

Selain inovasi internal, pemerintah daerah menunjukkan keterbukaan terhadap praktik dari daerah lain. Informan menyebutkan contoh pendampingan korban berbasis komunitas dan pembentukan tim perlindungan anak di setiap desa. Keterbukaan ini menunjukkan adanya perspektif *learning-oriented*. Namun, penerapan ide dari luar tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus disesuaikan dengan kondisi lokal, aturan, dan ketersediaan anggaran. Hal ini wajar, sebab *thinking across* bukan menyalin program, melainkan mengadaptasi praktik baik agar sesuai dengan konteks daerah.

Masalah utama dalam *thinking across* adalah belum meratanya penerapan inovasi. Masyarakat merasakan manfaat ruang bermain ramah anak, sekolah ramah anak, dan puskesmas ramah anak, tetapi manfaat tersebut lebih terasa di wilayah yang dekat dengan pusat layanan. Desa terpencil masih menghadapi akses yang lebih terbatas. Dengan demikian, inovasi belum sepenuhnya inklusif. KLA seharusnya memastikan bahwa anak di desa terpencil memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak yang sama dengan anak di wilayah perkotaan.

Untuk memperkuat *thinking across*, perlu dibangun mekanisme kolaborasi yang lebih operasional. Pemerintah dapat membentuk atau memperkuat tim perlindungan anak tingkat desa, melibatkan kader kesehatan, guru, tokoh agama, tokoh perempuan, karang taruna, dan Forum Anak. Tim ini dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan kabupaten. Selain itu, perlu dibuat alur rujukan yang sederhana: siapa menerima laporan, siapa melakukan asesmen awal, siapa menghubungi UPTD PPA, bagaimana menjaga kerahasiaan korban, dan bagaimana pemulihan dilakukan. Kolaborasi lintas sektor akan lebih efektif apabila alur kerja dipahami oleh semua aktor.

Verifikasi lapangan hybrid KLA juga dapat menjadi ruang pembelajaran lintas sektor. Melalui verifikasi, pemerintah daerah memperoleh umpan balik mengenai kekuatan dan kelemahan pelaksanaan KLA. Namun, verifikasi sebaiknya tidak dipahami sebagai kegiatan menjelang penilaian

semata. Verifikasi harus menjadi instrumen pembelajaran berkelanjutan agar setiap OPD mengetahui indikator yang perlu diperbaiki dan kontribusi yang harus diberikan. Dengan demikian, penghargaan KLA tidak menjadi tujuan akhir, tetapi menjadi pemicu perbaikan tata kelola perlindungan anak.

Table 5. Peta Kolaborasi Lintas Sektor dalam KLA Sinjai

Aktor	Kontribusi potensial	Catatan penguatan
DP3AP2KB/UPTD PPA	Koordinasi KLA, layanan pengaduan, pendampingan korban, pencatatan kasus.	Perlu integrasi data, SOP rujukan, dan peningkatan tenaga pendamping.
Dinas Pendidikan/Sekolah	Sekolah ramah anak, pencegahan bullying, edukasi hak anak.	Perlu mekanisme pelaporan aman dan pelatihan guru.
Dinas Kesehatan/Puskesmas	Deteksi dini kesehatan, stunting, dukungan pemulihan korban.	Perlu integrasi layanan kesehatan dan perlindungan anak.
Pemerintah desa/kelurahan	Sosialisasi, pengawasan lingkungan, penerimaan laporan awal.	Perlu tim perlindungan anak desa dan penguatan kader.
Forum Anak	Aspirasi anak, kampanye kreatif, masukan evaluasi.	Perlu ruang partisipasi bermakna dan umpan balik pemerintah.
Masyarakat/keluarga	Pencegahan kekerasan, pengasuhan positif, keberanian melapor.	Perlu edukasi berkelanjutan dan perlindungan dari stigma.

Table 5 menggambarkan peran masing-masing aktor dalam kolaborasi KLA. DP3AP2KB, UPTD PPA, sekolah, puskesmas, desa, Forum Anak, masyarakat, dan dunia usaha memiliki kontribusi berbeda, sehingga koordinasi lintas sektor perlu dikelola melalui SOP rujukan, pembagian peran, dan forum evaluasi bersama.

6. Pembahasan Teoretis: *Dynamic Governance* dalam KLA Sinjai

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga kapabilitas *dynamic governance* telah muncul dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten Sinjai, tetapi tingkat kematangannya berbeda. *Thinking ahead* tampak pada kesediaan menyesuaikan kebijakan, orientasi jangka panjang, dan program yang mendukung masa depan anak. *Thinking again* tampak pada evaluasi rutin dan penyusunan rencana aksi. *Thinking across* tampak pada pemanfaatan aplikasi, integrasi klaster, dan kolaborasi lintas sektor. Namun, ketiganya masih menghadapi hambatan yang saling berkaitan.

Hambatan *thinking ahead* berupa keterlambatan informasi kebijakan dan ketimpangan distribusi program berkaitan dengan hambatan *thinking across* berupa akses internet dan koordinasi lintas sektor. Sementara itu, hambatan *thinking again* berupa rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan tindak lanjut berkaitan dengan kualitas data yang digunakan untuk perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa *dynamic governance* tidak dapat dipahami sebagai tiga indikator yang terpisah. Ketiganya membentuk siklus pembelajaran: pemerintah membaca masa depan, menjalankan program, mengevaluasi hasilnya, belajar dari pihak lain, lalu memperbaiki kebijakan berikutnya.

Dalam konteks Sinjai, siklus tersebut belum sepenuhnya tertutup. Data kasus telah tersedia,

tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peta risiko dan prioritas intervensi. Evaluasi dilakukan, tetapi partisipasi masyarakat belum maksimal. Inovasi ada, tetapi belum merata. Dengan demikian, tantangan utama adalah memperkuat koneksi antara data, evaluasi, dan inovasi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap data kasus masuk ke ruang pengambilan keputusan, setiap evaluasi menghasilkan perbaikan program, dan setiap inovasi diuji keberhasilannya berdasarkan kebutuhan wilayah.

Dari sisi teori administrasi publik, kasus ini memperlihatkan pentingnya menggabungkan pendekatan kelembagaan dan pendekatan kolaboratif. Kelembagaan diperlukan agar program memiliki dasar hukum, struktur, anggaran, dan prosedur. Kolaborasi diperlukan karena masalah anak berada di banyak ruang sosial. *Dynamic governance* berada di antara keduanya: ia membutuhkan struktur yang jelas, tetapi juga menuntut kemampuan bergerak cepat, belajar, dan membuka diri terhadap ide dari luar. Tanpa struktur, kolaborasi akan lemah. Tanpa pembelajaran, struktur akan kaku.

Penerapan *dynamic governance* juga menuntut perubahan budaya birokrasi. Program KLA tidak cukup dijalankan sebagai kewajiban memenuhi indikator penilaian. KLA harus dipahami sebagai agenda perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berlangsung sepanjang tahun. Apabila budaya kerja masih berorientasi pada dokumen penilaian, maka inovasi akan muncul menjelang evaluasi saja. Sebaliknya, apabila budaya kerja berorientasi pada pembelajaran, maka data harian, laporan masyarakat, keluhan anak, dan pengalaman petugas akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan.

Pembelajaran penting dari penelitian ini adalah bahwa penghargaan KLA dan peningkatan kasus kekerasan dapat berjalan bersamaan. Hal ini bukan kontradiksi sederhana, tetapi menunjukkan kompleksitas tata kelola. Daerah dapat memiliki dokumen dan program KLA yang baik, namun tetap menghadapi risiko kekerasan apabila pencegahan belum menyentuh akar masalah di keluarga dan komunitas. Oleh sebab itu, keberhasilan KLA perlu dilihat secara lebih substantif, yaitu apakah anak merasa aman, apakah keluarga memahami hak anak, apakah sekolah bebas dari perundungan, apakah korban memperoleh perlindungan, dan apakah masyarakat berani melapor.

Berdasarkan analisis tersebut, *dynamic governance* di Sinjai berada pada tahap berkembang. Pemerintah daerah telah memiliki komitmen dan inovasi awal, tetapi masih membutuhkan konsolidasi sistem. Konsolidasi ini meliputi tiga hal: pertama, membangun data terpadu dan peta risiko anak; kedua, memperkuat mekanisme evaluasi partisipatif; ketiga, memperluas inovasi hingga desa melalui jejaring perlindungan anak berbasis komunitas. Ketiga agenda ini dapat menjadi dasar penguatan KLA yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

7. Implikasi Kebijakan

Implikasi pertama adalah perlunya komunikasi kebijakan yang lebih cepat dan berjenjang. Setiap

perubahan regulasi atau arahan program dari pusat dan provinsi perlu diterjemahkan ke dalam panduan singkat bagi pelaksana kabupaten, kecamatan, desa, sekolah, dan layanan kesehatan. Panduan ini harus menjelaskan apa yang berubah, siapa yang bertanggung jawab, dan langkah apa yang harus dilakukan. Dengan cara ini, keterlambatan pemahaman dapat dikurangi.

Implikasi kedua adalah perlunya penguatan sistem data perlindungan anak. SIMFONI PPA perlu dioptimalkan, tetapi pemerintah juga harus menyiapkan prosedur manual untuk wilayah yang terkendala jaringan. Data kasus perlu dianalisis secara berkala, bukan hanya direkap. Analisis dapat mencakup tren, lokasi, jenis kekerasan, usia korban, dan status tindak lanjut. Hasil analisis kemudian digunakan dalam rapat perencanaan dan evaluasi KLA.

Implikasi ketiga adalah perlunya evaluasi partisipatif yang lebih aman bagi masyarakat. Pemerintah dapat menyediakan forum warga, kanal pengaduan rahasia, dan sosialisasi perlindungan pelapor. Keterlibatan masyarakat tidak boleh hanya diminta saat rapat formal, karena banyak warga merasa sungkan atau takut. Mekanisme informal melalui kader, guru, tokoh agama, atau pendamping desa dapat menjadi jembatan penting.

Implikasi keempat adalah perlunya pemerataan inovasi. Sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, ruang bermain ramah anak, dan forum anak harus diarahkan agar tidak hanya terkonsentrasi di pusat kabupaten. Pemerintah daerah dapat membuat prioritas perluasan berdasarkan peta risiko dan akses layanan. Desa terpencil perlu memperoleh perhatian khusus agar prinsip keadilan wilayah dalam KLA dapat terwujud.

Implikasi kelima adalah penguatan jejaring perlindungan anak desa. Tim atau kader perlindungan anak desa dapat membantu deteksi dini, sosialisasi hak anak, pendampingan awal, dan penghubung dengan UPTD PPA. Model ini tidak dimaksudkan menggantikan layanan profesional, tetapi mempercepat respons awal dan memperluas jangkauan pemerintah daerah.

Table 6. Rekomendasi Operasional Penguatan Dynamic Governance KLA

Rekomendasi	Langkah praktis	Aktor utama
Percepatan komunikasi kebijakan	Membuat ringkasan kebijakan, grup koordinasi resmi, dan jadwal sosialisasi berjenjang.	DP3AP2KB, kecamatan, desa, OPD terkait.
Peta risiko anak berbasis desa	Mengolah data kasus, akses layanan, sekolah ramah anak, dan kondisi jaringan untuk menentukan prioritas.	DP3AP2KB, UPTD PPA, Bappeda, desa.
Evaluasi partisipatif	Melibatkan Forum Anak, sekolah, kader desa, dan masyarakat dalam umpan balik rutin.	DP3AP2KB, Forum Anak, pemerintah desa.
Pemerataan inovasi	Memperluas sekolah/puskesmas/ruang bermain ramah anak ke wilayah terpencil secara bertahap.	OPD pendidikan, kesehatan, desa, DP3AP2KB.

Rekomendasi	Langkah praktis	Aktor utama
Jejaring perlindungan anak desa	Membentuk atau menguatkan tim perlindungan anak desa dan SOP rujukan sederhana.	Pemerintah desa, UPTD PPA, tokoh masyarakat.

Table 6 merangkum rekomendasi operasional untuk memperkuat penerapan *dynamic governance*. Rekomendasi tersebut menekankan percepatan komunikasi kebijakan, penyusunan peta risiko berbasis desa, penguatan kanal pelaporan, evaluasi partisipatif, pemerataan inovasi, dan penguatan kapasitas pendamping.

8. Model Penguatan *Dynamic Governance* KLA Berbasis Desa

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan *dynamic governance* KLA di Kabupaten Sinjai dapat diarahkan pada model berbasis desa. Model ini berpijak pada asumsi bahwa sebagian besar pengalaman anak terjadi pada lingkungan terdekat, yaitu keluarga, sekolah, tempat bermain, rumah ibadah, dan komunitas desa. Oleh karena itu, tata kelola KLA tidak cukup hanya kuat pada level kabupaten. Kapasitas kabupaten perlu diturunkan menjadi sistem kerja yang mudah dipahami dan dapat dijalankan oleh aktor desa. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi menjadi simpul awal pencegahan dan respons perlindungan anak.

Model berbasis desa memerlukan tiga lapisan kerja. Lapisan pertama adalah lapisan deteksi dini. Pada lapisan ini, kader desa, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Forum Anak dapat membantu mengenali risiko kekerasan, perundungan, perkawinan anak, anak putus sekolah, serta masalah kesehatan anak. Deteksi dini tidak berarti melakukan penanganan profesional, tetapi mengenali tanda awal dan menghubungkannya dengan layanan yang tepat. Lapisan kedua adalah lapisan respons awal. Pada lapisan ini, pemerintah desa perlu memiliki alur sederhana mengenai penerimaan aduan, perlindungan kerahasiaan korban, dan kontak rujukan ke UPTD PPA. Lapisan ketiga adalah lapisan pembelajaran. Setiap kasus dan kegiatan pencegahan perlu dievaluasi agar desa mengetahui masalah berulang dan kebutuhan intervensi berikutnya.

Model ini juga dapat memperkuat hubungan antara SIMFONI PPA dan data lokal. Apabila jaringan internet tidak stabil, desa dapat menggunakan formulir pencatatan awal yang aman dan standar, kemudian data disampaikan kepada UPTD PPA untuk diverifikasi dan diinput ke sistem. Dengan cara ini, keterbatasan digital tidak menghentikan proses pelaporan. Namun, keamanan data tetap harus dijaga. Informasi korban tidak boleh disebar di forum umum atau media sosial. Petugas desa perlu memahami prinsip kerahasiaan, persetujuan, dan perlindungan korban. Tanpa perlindungan data, upaya memperluas pelaporan justru dapat menimbulkan stigma baru bagi korban.

Dalam praktiknya, penguatan desa harus tetap didukung oleh kabupaten. DP3AP2KB dapat menyusun modul singkat hak anak, alur rujukan, dan cara melapor. UPTD PPA dapat memberikan pelatihan kepada kader desa dan menyediakan nomor kontak rujukan yang jelas. Dinas pendidikan dapat memastikan sekolah memiliki mekanisme anti-bullying. Puskesmas dapat mendukung deteksi dini kekerasan dan kesehatan anak. Forum Anak dapat menyampaikan aspirasi dan membuat kampanye dengan bahasa yang dekat dengan anak. Jika setiap aktor memahami perannya, kolaborasi tidak berhenti pada rapat koordinasi, tetapi berubah menjadi kerja lapangan yang saling terhubung.

Model berbasis desa juga relevan untuk mengatasi ketimpangan akses program. Desa terpencil yang belum menikmati inovasi seperti ruang bermain ramah anak atau layanan digital dapat diprioritaskan melalui pemetaan risiko. Pemerintah kabupaten dapat membuat tahapan perluasan: tahun pertama untuk desa dengan risiko tinggi, tahun kedua untuk desa dengan akses sedang, dan tahun berikutnya untuk konsolidasi seluruh desa. Skema bertahap lebih realistis daripada memaksakan pemerataan serentak tanpa sumber daya memadai. Prinsip utama model ini adalah keadilan akses, yaitu setiap anak, baik di pusat kota maupun desa terpencil, memperoleh perlindungan yang dapat dijangkau.

Dengan model ini, *thinking ahead* diwujudkan melalui peta risiko dan rencana perluasan berbasis desa; *thinking again* diwujudkan melalui evaluasi kasus dan program di tingkat lokal; sedangkan *thinking across* diwujudkan melalui kolaborasi desa, sekolah, puskesmas, forum anak, tokoh masyarakat, dan UPTD PPA. Model ini tidak menggantikan kebijakan KLA yang sudah ada, melainkan memperkuat implementasinya agar lebih dekat dengan kehidupan anak.

Table 7. Model Penguatan Dynamic Governance KLA Berbasis Desa

Lapisan model	Fungsi utama	Contoh kegiatan
Deteksi dini	Mengenali risiko dan kebutuhan anak sebelum masalah membesar.	Pemetaan anak rentan, pemantauan bullying, edukasi pengasuhan positif.
Respons awal	Menyediakan alur pelaporan dan rujukan yang aman.	Kontak UPTD PPA, formulir awal, perlindungan kerahasiaan korban.
Pembelajaran lokal	Menggunakan pengalaman kasus dan kegiatan sebagai bahan perbaikan.	Rapat evaluasi desa, masukan Forum Anak, laporan triwulan ke DP3AP2KB.
Pemerataan inovasi	Memastikan program ramah anak menjangkau wilayah terpencil.	Prioritas desa risiko tinggi, pelatihan kader, perluasan ruang bermain ramah anak.

Table 7 menawarkan model penguatan dynamic governance KLA berbasis desa. Model ini menempatkan desa sebagai ruang deteksi dini, respons awal, pembelajaran lokal, dan pemerataan inovasi agar perlindungan anak tidak hanya berpusat pada tingkat kabupaten, tetapi juga hadir lebih dekat dengan keluarga dan masyarakat.

4. CONCLUSIONS

Penerapan dynamic governance dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sinjai telah mulai terlihat melalui tiga kapabilitas utama. Pada aspek thinking ahead, pemerintah daerah menunjukkan kemampuan antisipatif melalui keterbukaan terhadap perubahan regulasi, penyusunan rencana kerja, dan orientasi jangka panjang pembangunan anak. Namun, kemampuan ini belum optimal karena arus informasi kebijakan belum selalu cepat dan distribusi program belum merata hingga seluruh desa.

Pada aspek thinking again, pemerintah daerah telah melakukan evaluasi rutin, menyusun rencana aksi, dan membuka ruang masukan dari Forum Anak serta masyarakat. Akan tetapi, evaluasi masih menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan tenaga pendamping, dan belum lengkapnya data lapangan akibat hambatan pelaporan. Evaluasi perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi mekanisme pembelajaran yang menghasilkan perbaikan desain program.

Pada aspek thinking across, pemerintah daerah telah mengembangkan inovasi dan kolaborasi lintas sektor melalui pemanfaatan SIMFONI PPA, integrasi lima klaster KLA, pengembangan sekolah dan puskesmas ramah anak, kampanye kreatif Forum Anak, serta verifikasi lapangan hybrid. Namun, inovasi tersebut masih terkendala akses internet, keterbatasan sumber daya, dan belum meratanya implementasi di desa terpencil. Oleh karena itu, dynamic governance di Kabupaten Sinjai dapat dikategorikan berkembang, tetapi masih memerlukan penguatan sistem data, koordinasi lintas sektor, evaluasi partisipatif, dan pemerataan inovasi berbasis desa.

Rekomendasi utama penelitian ini adalah DP3AP2KB Kabupaten Sinjai perlu memperkuat komunikasi kebijakan berjenjang, membangun peta risiko perlindungan anak berbasis desa, mengoptimalkan SIMFONI PPA dengan prosedur manual alternatif, memperluas partisipasi Forum Anak dan masyarakat dalam evaluasi, serta membentuk jejaring perlindungan anak desa. Bagi penelitian selanjutnya, kajian dapat diperluas dengan menilai efektivitas inovasi digital, kualitas layanan pendampingan korban, atau perbandingan penerapan dynamic governance KLA antara beberapa kabupaten.

REFERENCES

- Deddy, A., Nugroho, E., Perencanaan, B., Daerah, P., Bantul, K., & Kinerja, P. (2023). *Collaborative Governance Dalam Gerakan Cinta*. XXIII(3), 4497–4508.
- Duadji, N. (2018). *Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance*. 13(1), 1–22.
- Firda Pujianti, Entang Adhy Muhtar, T. S. (2023). *Jejaring Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota*. 14(2), 606–612.
- Hamudy, M. I. A. (2015). *Worth The Effort To Achieve The City Of Children*. 149–160.
- Irma Alviana, Slamet Rosyadi, Simin, R. I. (n.d.). *View of Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam*

- Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships.pdf*. 2021.
- Linda Widowati, Kristina Setyowati, D. G. S. (2023). *Dynamic Governance As Perspective in Indonesian Bureaucracy Reform*. 403–415.
- Rannita, S., Al, I., Publik, A., Ilmu, F., Politik, I., Riau, U. I., & Nasution, J. K. (2024). *Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru*. 1(1), 164–179.
- Rizki, M., Asari, H., & Riau, U. (2023). *Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Pembangunan Zona Integritas Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dynamic Governance Capability in Integrity Zone Development at The State Treasury Service Office*. 8(2), 321–338.
- Roza, D. (2018). *Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia*. 25(1), 198–215. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>
- Sari, A. I., Rusli, Z., & Riau, U. (2023). *Jurnal Administrasi Publik TATA KELOLA PEMERINTAHAN DINAMIS (DYNAMIC GOVERNANCE) DALAM PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU*. 5(1).
- Tandhim, A. W. A. (2025). *Efektivitas Collaborative Governance untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang*. 4, 391–404.